

ABSTRAKSI

ISNAR WITOYO, NPM : 18220017, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN TRENGGALEK. Pembimbing 1 : Dr. Suwarno, M.Si, Pembimbing 2 : Dr. Teguh Pramono, M.Si.

Tujuan dibuatnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) salah satunya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, yang nantinya dapat mewujudkan masyarakat informasi. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) salah satu regulator yang melaksanakan amanat undang-undang ini di daerah. Penelitian yang berlokasi di Kabupaten Trenggalek ini hendak menjawab permasalahan penelitian mengenai bagaimana Peran PPID Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan UU KIP sebagai penyedia dan pelayanan informasi publik demi mewujudkan keterbukaan informasi publik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, didapat hasil bahwa PPID Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan perannya baik dari aspek tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya melaksanakan UU KIP, adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan UU KIP baik terkait informasi yang dilindungi/tertutup maupun informasi publik yang perlu dipahami bersama. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik di pemerintah Kabupaten Trenggalek belum terimplementasikan secara maksimal. Dari hasil tersebut diharapkan PPID lebih meningkatkan kinerjanya sehingga makin banyak informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka bisa berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik, serta mengetahui informasi apa saja yang boleh diberikan kepada masyarakat atau informasi- informasi apa saja yang dikecualikan. Regulasi sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek agar segera dibuatkan, serta sarpras penunjang PPID dapatnya dipenuhi, termasuk SDM pengelola pelayanan informasi.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Masyarakat Informasi, *Good Governance*

ABSTRACTION

ISNAR WITOYO , NIM: 18220017 , IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 14 YEAR 2008 CONCERNING DISCLOSURE OF INFORMATION PUBLIC IN THE DISTRICT PSYCHOLOGY . Supervisor 1: Dr. Suwarno , M.Si , 2nd Supervisor : Dr. Teguh Pramono , M.Si .

The purpose of making Law no. 14 Year 2008 on Disclosure of Information of Public (KIP) one of which is to encourage the participation of society in the process of making the policy public and the management entity public that good , which will be able to realize a society of information . The Information and Documentation Management Officer (PPID) is one of the regulators who carries out the mandate of this law in the regions . Research that is located in the District Terri is going to answer the problems of research on how the role of the PPID District Terri in implementing UU KIP as a provider of services and public information in order to realize the disclosure of information public . Mechanical analysis of the data used in the study of this is the analysis of data qualitative . By using the approach of research d e skript if qualitative , obtained results that PPID District Terri has been carrying out its role both from the duty , authority , and responsibility to implement the Freedom of Information Law, while the obstacles are encountered is the lack of understanding of the community will be UU KIP both related information protected / closed and public information that needs to be understood together . Law No. 14 Year 2008 on Openness of Public in the government district Terri has not been implemented as a maximum . From the results it is expected PPID more improve its performance so that more and a lot of information public which can be accessed by the public , and also do socialization to the public so that they can contribute actively in the process of making the policy public , as well as find out information about what course that should be given to people or information - information anything that is excluded . Regulation as implementation of Law No. 14 of 2008 concerning disclosure of information public in Government Regional District Terri so soon made , and sarpras support PPID failure by fulfilled , including the HR manager of the service information .

Said Key : Disclosure of Information of Public , Public Information , Good Governance